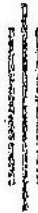


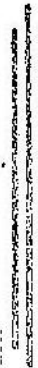


KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0519/D/1991 TANGGAL : 5 SEPTEMBER 1991



TENTANG
PENGALIHAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR MENJADI
SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1991

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0619/O/1991

TENTANG

PENGALIHAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
MENJADI SEKOLAH MENENGAH TINGKAT ATAS NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :

- Menimbang : bahwa untuk memperluas dayaampung Sekolah Menengah Atas Negeri, dipandang perlu mengalihkan Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia, Lembaran Negara Nomor 48 Tahun 1925 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968.
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 dan 30 Tahun 1990.
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1986;
 - e. Nomor 64/M Tahun 1988.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0172/Q/1983 dan Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - Nomor 0116/O/1991 tanggal 15 Maret 1991.

Perhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayanaan Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 20 Agustus 1991 Nomor B-762/T/91.

H E M U T U S K A N :

- Jenotapkan** :
Pertama : Mengalihkan GI Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) pada IKIP dan FKIP Universitas Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0116/O/91 tanggal 15 Maret 1991 menjadi SMA Negeri di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada dikum Pertama diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan pada dikum Pertama bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Keempat** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini dan mata anggaran yang relevan.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah SMA Negeri
menjadi 1.954 buah tersebar di 27 Propinsi.
Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

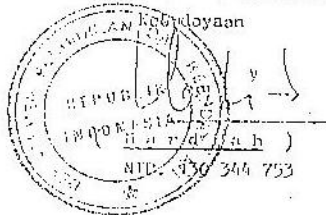
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 1991.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b
Sekretaris Jenderal
ttd
BAHBANG TRIANTORO

Salinan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektor dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Seluruh Indonesia
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi Seluruh Indonesia
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Pertahanan dan Kas Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

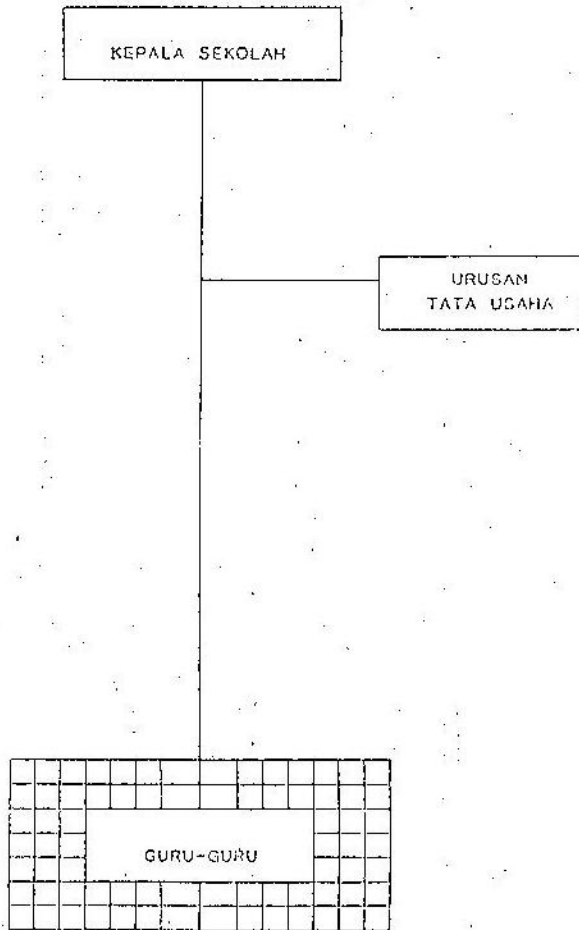
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan



LINAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEHUK : 0519/0/1991
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 1991

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



No.	Nama Sekolah yang diusulkan	Nama PGSD (Bekas SPGN/SGOR)	L O K A S :				Mata Anggaran
			Alamat Sekolah	Kecamatan	Kab/Kodyz/Kodyatip		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	ERI JAKARTA						
1.	1. SMA Negeri 112 Jakarta	PGSD IKIP Jakarta (Bekas SPGN 5 Jakarta)	Jl. Meruya Iliri, Palmerah Jakarta Barat	Kembangan	Kodyatip Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.001.5110 09.1.2.1038.23.01.001.5120 09.1.2.1038.23.01.001.5150 09.1.2.1038.23.01.001.5210 09.1.2.1038.23.01.001.5220 09.1.2.1038.23.01.001.5230 09.1.2.1038.23.01.001.5250 09.1.2.1038.23.01.001.5330	
2.	SMA Negeri 113 Jakarta	PGSD IKIP Jakarta (Bekas SPGN 7 Jakarta)	Jl. Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur	Pasar Rebo	Kodyatip Jakarta Timur		
2.	JAWA BARAT						
1.	SMA Negeri 7 Cirebon	PGSD IKIP Bandung (Bekas SPGN Cirebon)	Jl. Perjuangan, Cirebon	Kesambi	Kodya Cirebon	09.1.2.1038.23.01.002.5110 09.1.2.1038.23.01.002.5120 09.1.2.1038.23.01.002.5150 09.1.2.1038.23.01.002.5210 09.1.2.1038.23.01.002.5220 09.1.2.1038.23.01.002.5230 09.1.2.1038.23.01.002.5250 09.1.2.1038.23.01.002.5330	
2.	SMA Negeri 7 Bogor	PGSD IKIP Bandung (Bekas SPGN Bogor)	Jl. Palitupa, Perumnas Santarajati	Kota Bogor Utara	Kodya Bogor		
3.	JAWA TENGAH						
1.	SMA Negeri 3 Slati	PGSD IKIP Semarang (Bekas SPGN Slati)	Jl. Adhikasa, Slati	Slati	Kab. Tasai	09.1.2.1038.23.01.002.5110 09.1.2.1038.23.01.002.5120 09.1.2.1038.23.01.002.5150 09.1.2.1038.23.01.002.5210 09.1.2.1038.23.01.002.5220 09.1.2.1038.23.01.002.5230 09.1.2.1038.23.01.002.5250 09.1.2.1038.23.01.002.5330	
2.	SMA Negeri 3 Cilacap	PGSD IKIP UNS (Bekas SPGN Cilacap)	Jl. Pendidikan Kemahasiswaan No. 91 Cilacap	Cilacap Tengah	Kab. Cilacap		
3.	SMA Negeri 3 Magelang	PGSD IKIP Semarang (Bekas SPGN Magelang)	Jl. Galdi Subrata St. Magelang	Magelang Selatan	Kodya Magelang		

1	2	3	4	5	6	7
21. IRIAN JAYA						
1. SMA Negeri 5 Sorong	PSD FKIP UNZEN (Bekas SPON Sorong)	Jl. Pinda No. 49 Sorong	Sorong	Kab. Sorong	09.1.2.1038.23.01.025.5110 09.1.2.1038.23.01.025.5120 09.1.2.1038.23.01.025.5130 09.1.2.1038.23.01.025.5140 09.1.2.1038.23.01.025.5200 09.1.2.1038.23.01.025.5210 09.1.2.1038.23.01.025.5220 09.1.2.1038.23.01.025.5230 09.1.2.1038.23.01.025.5240	
22. TIMOR TIMOR						
1. SMA Negeri 3 Dili	PSD FKIP UNDANA (Bekas SPON Dili)	Jl. Timor Tibur, Dili	Dili Tengah	Kab. Dili	09.1.2.1038.23.01.027.5110 09.1.2.1038.23.01.027.5120 09.1.2.1038.23.01.027.5150 09.1.2.1038.23.01.027.5210 09.1.2.1038.23.01.027.5220 09.1.2.1038.23.01.027.5230 09.1.2.1038.23.01.027.5240 09.1.2.1038.23.01.027.5250	

Selain sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal,

td
BANDUNG TELANIPORO

